

Analisis Dana Perimbangan Kaitannya Dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020

Siti Fatimah^{1*}, Tuty Handayani²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Corresponding Author : sifa25023@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Daya saing obyek wisata,
analisa Model Diamond, 4A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020 dan (2) Menganalisis kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kasus terutama pendekatan pertumbuhan dan pendekatan kontribusi yang mengacu pada kriteria Soekartawi (1995). Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi tentang seberapa besar dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi cukup besar (sangat berpengaruh) dan kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020 cukup signifikan. Dengan tersajinya data dan dokumen penelitian ini, maka selanjutnya akan dapat digunakan sebagai bahan informasi sekaligus bahan kajian bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan yang sekaligus dapat menentukan model alokasi anggaran yang lebih berorientasi bagi kepentingan masyarakat (public oriented)

ABSTRACT

Keyword:

Economic Growth (PDRB)

The research is aimed to (1) Analyze what is the impact of balanced funds allocation toward the economic growth of West Nusa Tenggara province since the year of 2016 – 2020 and (2) analyze the balanced funds contribution toward the support of economic growth of West Nusa Tenggara province since year of 2016 – 2020. The method applies in this research based on case study especially the growth and contribution approach which refer to Soekartawi criteria (1995). This research is aimed to be able to gather the data and information about how big is the impact

of balanced funds allocation toward the economic growth of West Nusa Tenggara Province since year of 2016 – 2020.

The reasearch shows that the impact of balanced funds allocation on the economic growth is quite significant (very effective) and balanced funds contribution on the support of economic growth of West Nusa Tenggara Province since the year of 2016 – 2020 is quite significant. By providing the data and the document of this research, it will be used as source of information and refference for the functionary in taking the policies that is able to determine funds allocation model that more oriented on public oriented (public oriented)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan arus pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini dimaksudkan karena kemampuan tiap daerah dalam menggali potensinya menjadi suatu indikator kinerja keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Oleh karenanya pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah hendaknya terus dikembangkan. Secara lebih konkrit unsur pendapatan dan belanja daerah dapat ditunjukkan melalui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang menggantungkan sumber penerimaannya melalui bantuan pemerintah pusat. Padahal jika diamati secara priodik dari waktu ke waktu, pemerintah pusat juga selalu mengalami kesulitan dalam mendanai pengeluarannya, baik yang menyangkut pengeluaran belanja aparatur pemerintah maupun untuk belanja pelayanan publik. Terlebih sekarang dengan telah diberlakukannya otonomi daerah telah membawa pengaruh beban pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak semakin kecil. Oleh karenanya sekarang ini melalui pemberian kewenangan

masing-masing daerah yang semakin luas diharapkan setiap daerah dituntut agar dapat membiayai dirinya sendiri melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Karena tolok ukur keberhasilan setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, proses pembangunan daerah, dan pelayan publik akan sangat tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu menggali setiap potensi daerah untuk kemudian mengatur dalam bentuk belanja aparatur pemerintah dan belanja pelayanan publik secara berimbang dan proforsional sesuai yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002:59).

Dari sisi reformasi keuangan sebagai pelaksanaan amanat otonomi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut semakin membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD). Perubahan mendasar tersebut adalah adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Sebagaimana menurut Abdul Halim (2002:5) bahwa sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya reformasi, pertanggung jawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.

Pergeseran atau reformasi yang mendasar terhadap pengelolaan anggaran daerah memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD merupakan suatu daftar rincian penerimaan dan belanja daerah yang sekaligus berfungsi sebagai alat atau dasar pengelolaan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran tertentu. Dimana semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah dalam era otonomi daerah akhir-akhir ini maka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan identifikasi potensi dan sumber perolehan keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara implisit ketersediaan data mengenai perkembangan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dapat

dijadikan bahan acuan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan pola kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana tingkat kemandirian dan desentralisasi fiskal daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

Mengingat APBD merupakan salah satu alat atau instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah proses penyusunan dan pelaksanaan APBD harus sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya Product Domestic Regional Brutto (PDRB) pada tingkat nasional dan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan daerah nilai tambah pada suatu waktu tertentu (setiap tahun).

Oleh karenanya untuk melihat sampai seberapa besar setiap daerah mampu melaksanakan otonomi secara konsekuen akan sangat tergantung dari tingkat kemandirian daerah itu sendiri dalam mendanai dirinya sendiri. Selanjutnya untuk melihat sampai sejauh mana peran dan fungsi alokasi dana perimbangan baik yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan PDRB akan dapat dilakukan analisis secara terperinci melalui kegiatan penelitian yang berjudul “Dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020”.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.
- b. Berapa besar kontribusi dana perimbangan dalam mendorong laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis bagaimana dampak pengalokasian dana perimbangan terhadap laju percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.
- b. Menganalisis kontribusi dana perimbangan terhadap laju percepatan daya dorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tahun 2016-2020.

Hal-hal yang Akan Dianalisis

Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal antara lain:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Pendapatan Asli Daerah
- c. Dana Perimbangan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasbulah (2016 : 9) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Total Pendapatan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak (BHPBP), APBD dan PDRB. Dari hasil kajiannya disimpulkan bahwa proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 7,87 persen, proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap TPD sebesar 20,68 persen, rasio PAD terhadap belanja aparatur sebesar 14,16 persen, rasio PAD

ditambah BHPBP terhadap belanja aparatur sebesar 37,19 persen. Akan tetapi jika diamati perkembangannya dari tahun ke tahun nampak bahwa proporsi PAD ini semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar. Ketergantungan yang semakin besar ini antara lain disebabkan oleh kondisi umum yang terjadi di semua kabupaten/kota yang diakibatkan oleh perubahan struktur anggaran seperti : gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keadaan ini akan mengakibatkan bertambahnya total APBD yang sumber penerimaannya berasal dari dana sumbangan pemerintah pusat.

Dalam penelitiannya yang lain Hasbullah (2016 : 6) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dimana variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Biaya Pungutan PAD, Target Penerimaan PAD dan APBD. Dikatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari luar (ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak luar/ekstern (terutama pemerintah pusat/provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang semakin tinggi pula. Berdasarkan hasil kajiannya sejak Tahun Anggaran 2012 – 2015 disimpulkan bahwa besarnya rasio kemandirian keuangan kabupaten Lombok Barat sebesar 8,70 persen, 6,65 persen, 8,34 persen dan 8,09 persen. Ini berarti kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat relatif masih rendah bahkan cenderung menurun.

Landasan Teori

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nizarwan dalam Halim (2014 : 70) dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004. Kesimpulannya adalah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik senantiasa berpegang pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas

Menurut Mardiasmo (2014) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut Indra Bastian (2016 : 6) dalam bukunya yang berjudul Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa penyusunan APBD adalah suatu hal yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi

daerah otonom yang bertujuan untuk : menentukan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat, suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, memberi isi dan arti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sarana untuk pengawasan dan pemberian kuasa kepala daerah untuk penyelenggaraan keuangan daerah.

Selanjutnya menurut Hasbullah (2016 : 4) Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu instrumen untuk mencermati kemampuan suatu daerah dalam aspek finansial untuk mengorganisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara parsial dikatakan kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan suatu daerah dalam menggali unsur-unsur penerimaan baik penerimaan aparatur maupun penerimaan publik dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk selanjutnya dipergunakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh sebab itu pembahasan mengenai analisis kemampuan keuangan daerah disini bertitik tolak dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka

Menurut Jaya dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 6) Keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bastian (2016:8) adanya hubungan yang erat antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. Sehingga baik dalam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah maupun pelaksanaannya, menceminkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang mencakup hal – hal sebagai berikut (1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; (2) Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; (3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah termasuk prinsip – prinsip pembagian sumber – sumber keuangan yang adil; (4) Mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (5) Dapat menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel) dan pasti; dan (6) Semakin mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Devas et al dikutip dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 7) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip : (1) tanggung jawab, (2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian. Melalui misi utama dan tujuan utama pengelolaan keuangan daerah di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, yang meliputi DPRD dan masyarakat. Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam

pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Mardiasmo, 2012).

Selanjutnya Nizarwan (2014:70) mengatakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah hendaknya harus memperhatikan berbagai hal seperti : (1) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas; (2) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sumber penerimaan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan

bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan.

Mardiasmo dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2014: 36) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah mensejahterakan masyarakat,

maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan yang meliputi :

a. Disiplin Anggaran

APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.

b. Keadilan Anggaran

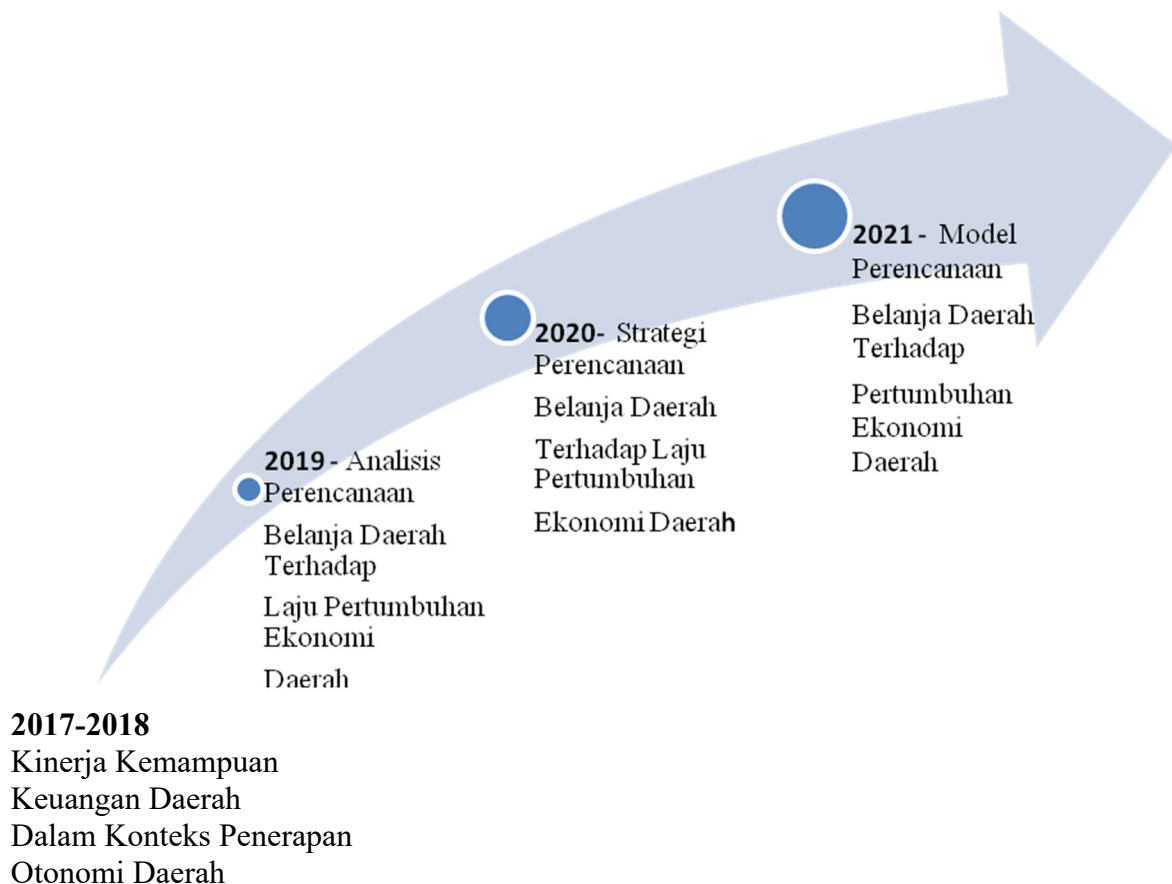
Pendapatan Daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

Kerangka Konseptual



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir Penelitian



Gambar : 2.1. Gambar Roadmap Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:11). Selanjutnya menurut Kuncoro (2003:8) Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat secara purposive

sampling dengan dasar pertimbangan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang paling banyak dan terpadat jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diharapkan dengan terpilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian akan memberikan berbagai kemudahan dari berbagai akses seperti data dan informasi lainnya.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data, informasi yang berkaitan dengan analisis dana perimbangan dilakukan dengan cara :

- Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan

analisis pertumbuhan ekonomi sesuai dengan judul penelitian.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terutama pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB sehubungan dengan data-data dan informasi terkait dengan variabel-variabel penelitian di atas.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan langsung dari Biro sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang dimaksudkan terdiri dari : data APBD, Perubahan APBD, laporan perhitungan APBD, realisasi penerimaan daerah, realisasi belanja daerah, Nota Perhitungan APBD, Arus Kas dan Buku Perhitungan APBD, data PDRB, data demografis, perkembangan APBD, penerimaan dan belanja daerah, dan mekanisme penganggaran serta data-data Provinsi Nusa Tenggara Barat lainnya yang mendukung judul penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016-2020.

Identifikasi dan Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah
- Dana Perimbangan
- Pendapatan lain Yang Syah
- Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

Model Analisis Data

Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan Terhadap PDRB

Guna mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan PAD terhadap PDRB selama lima tahun terakhir (2016-2020) akan dianalisis dengan formulasi Widodo dalam Muin (2003: 36) sebagai berikut:

$$\Delta X_t = \frac{X_{it} - X_{it-1}}{X_{it-1}}$$

dimana :

ΔX_t = Laju pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap PDRB

ΔX_{1t} = Laju pertumbuhan PAD

ΔX_{2t} = Laju pertumbuhan PDRB

t = Tahun txx

t-1 = Tahun Sebelumnya

X1 = Variabel PAD

X2 = Variabel PDRB

Analisis Kontribusi Dana

Perimbangan Terhadap PDRB

Untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilakukan analisis dengan menggunakan rumus (G. Tan Melly, 1977) sebagai berikut:

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

dimana:

X = Persentase Kontribusi PAD terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur.

A = Penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun ke n.

B = PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun ke n.

Kriteria untuk menentukan besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan kriteria sebagai berikut (Soekartawi :1995)

Kriteria Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PDRB

No.	Besarnya Kontribusi (%)	Kriteria
1	76-100	Sangat besar

2	51 – 75	Besar
3	26 – 50	Cukup besar
4	0 – 25	Kurang besar

4. HASIL PENELITIAN

Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi NTB

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 20.153,15 Km², yang terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau yang ada di Provinsi NTB, terdapat 40 pulau yang sudah berpenghuni. Secara astronomis, Provinsi NTB terletak antara 115^o 46' – 119^o 05' Bujur Timur dan 8^o10' – 9^o5' lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Provinsi NTB memiliki batas wilayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah Barat Selat Lombok dan Provinsi Bali, serta sebelah Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten dan dua Kota yang terletak di dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, 24 kecamatan, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Kondisi geografis NTB sangat bervariasi dimana pulau Lombok terdiri atas perbukitan dengan pusat gunung Rinjani, terletak ditengah-tengah pulau Lombok, serta gugusan pegunungan terletak di bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan dataran rendah merupakan kawasan pertanian yang terhampar di bagian tengah memanjang dari arah timur ke barat. Sedangkan di pulau Sumbawa, gugusan pegunungan terdapat di sepanjang pantai utara pulau Sumbawa.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Wilayah NTB

Berdasarkan data proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Provinsi NTB sebanyak 5.013.687 jiwa, dengan rincian Laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 2.579.956 jiwa, dengan ratio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.192.110 jiwa atau 23,77 persen dari total penduduk Provinsi NTB dan terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 144.707 jiwa atau 2,88 persen dari total penduduk Provinsi NTB. Jumlah penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi pada tahun 2010 jumlah penduduk NTB sebanyak 5.013.687 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 497.625 jiwa selama periode sepuluh tahun terakhir atau Tahun 2020. Selain mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, penduduk Provinsi NTB terdistribusi tidak merata, karena sekitar 70,06 persen (3.512.689 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan sebanyak 29,92 % (1.500.998 jiwa) berdomisili di Pulau Sumbawa.

Kepadatan, Struktur dan Komposisi Penduduk

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk di Provinsi NTB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk mencapai 237 jiwa per KM² pada tahun 2014 meningkat menjadi 249 jiwa per KM² pada tahun 2020. Kepadatan penduduk ini terkonsentrasi pada Kota Mataram yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Menurut kelompok umur, komposisi penduduk pada tahun 2010 terbanyak pada kelompok umur 5 – 9 tahun yaitu sebanyak 501.136 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil berada pada kelompok umur 7- 74 tahun

sebanyak 70.554 jiwa. Xsecara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur kisaran 15 – 64 tahun sebvanyak 3.237.988 jiwa atau sekitar 65,34 persen dari jumlah kessleruhan penduduk Provinsi nusa tenggara Barat.

Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal (1), pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah, b. Dana Perimbangan; dan c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Untuk melihat perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima Tahun terakhir dapat disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2. Anggaran dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah (PD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 – 2020.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Perkembangan (%)
2016	3.802.933.455.799	3.949.996.798.343	103,87	12,43
2017	5.121.402.497.258	5.083.156.004.899	99,25	28,72
2018	5.360.502.949.869	4.941.246.974.629	92,18	-2,87
2019	4.516.062.497.275	5.070.385.497.278	112,26	2,61
2020	5.506.426.704.676	5.793.152.598.582	105,21	14,26
Jumlah	24.307.328.104.000	24.837.937.873.000	512,77	55,15
Rata-rata	4.861.465.620.975	4.967.587.574.746	102,55	11,03

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa anggaran Pendapatan asli daerah Provinsi NTB ditargetkan sebesar Rp 3.802.933.445.799 sedangkan realisasinya pada Tahun 2016 sebesar Rp 3.949.996.798 atau sekitar 103,87 persen. Tahun 2017 sebesar Rp 5.083.156.004.899 atau turun menjadi sekitar 99,25 persen. Tahun 2018 turun lagi menjadi Rp 4.941.246.974.629 atau turun menjadi sekitar 92,18 persen. Tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 5.070.385.497.278 atau naik menjadi sekitar 112,26 persen. Tahun 2020 menjadi Rp 5.793.152.598.582 atau turun menjadi sekitar 105,21 persen. Secara kuantitatif memang pendapatan asli daerah Provinsi NTB berfluktuatif terhitung sejak Tahun 2016 – 2020 dan cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2016 – 2020 sebesar 102,55

persen. Dilihat dari segi perkembangannya Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2016 – 2020 juga cukup fluktuatif. Data di atas memperlihatkan bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 28,72 persen, sedangkan perkembangan yang terendah terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan sebesar -2,87 persen. Namun jika dilihat secara rata selama lima tahun terakhir rata-rata perkembangannya mengalami kenaikan sebesar 11,03 persen.

Dana Perimbangan Provinsi NTB

Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2000, merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana

Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan sumber pendanaan. Selama ini Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat bergantung dari kucuran dana dari pusat melalui Dana Perimbangan tersebut. Kondisi ini masih terus berlanjut sampai saat ini karena Provinsi Nusa Tenggara Barta masih belum mampu untuk

memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan berbagai sektor, sehingga keberadaan dana perimbangan ini sangat membantu guna merealisasikan program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya untuk melihat perkembangan dana perimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi NTB sejak Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi Th.2016 (000)	Realisasi Th.2017 (000)	Realisasi Th.2018 (000)	Realisasi Th.2019 (000)	Realisasi Th.2020 (000)
(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
Dana Bagi Hasil Pajak	98.450,50	102.333,60	127.756,40	124.847.165	174.135.498
D.B.H. Bkn Pajak SDA	247.954,40	367.529,11	325.952,74	59.124.751	60.477.630
Dana Alokasi Umum	998.863,37	1.153.777,78	1.158.374,60	1.475.540.106	1.583.746.053
Dana Alokasi Khusus	112.985,70	143.742,3	145.426,21	355.202.497	434.261.210
D. Al. khusus Non Fisik	1.124.781,03	1.501.552,21	1.624.147,05	1.139.543.578	1.246.582.909
Jumlah	2.583.035.637	3.268.935.637	3.381.657.776	3.604.324.958	3.667.593.358
Rata-rata	516.607.127	653.787.124	676.331.555	720.864.991	733.518.671

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan perkembangan jumlah dana Perimbangan yang direalisasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, gambaran di atas memperlihatkan bahwa sejak Tahun 2016 Realisasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 2,58 trilyun dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 3,66 trilyun atau meningkat sekitar 41,96 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu mencukupi kebutuhan untuk belanja pembangunannya, sehingga bantuan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan ini sangat membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan program-program pembangunan di berbagai bidang yang masih membutuhkan pendanaannya. Secara faktual kontribusi terbesar dana

perimbangan di atas disumbangkan oleh kontribusi Dana Alokasi Umum yang diikuti oleh kontribusi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (sektor pendidikan, kesehatan dan sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).

Perkembangan Dana Perimbangan Berdasarkan Sumber

Selama ini dana perimbangan baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) telah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam melengkapi kebutuhan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara kuantitatif pertumbuhan dana perimbangan dimaksud setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dikarenakan pendapatan daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan pembangunan di daerahnya, maka dana perimbangan yang

bersumber dari pusat telah menjadi faktor yang sangat strategis guna merealisasikan program-program pembangunan masyarakat di daerah. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dijelaskan melalui realisasi dan pertumbuhan dana perimbangan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak	Pertumbuhan (%)
1.	2016	98.450.500	7,56
2.	2017	102.333.600	4,08
3.	2018	127.756.400	24,50
4.	2019	124.847.165	- 2,36
5.	2020	174.135.498	40,32
J u m l a h		627.523.163	74,10
Rata-rata		125.504.632	14,82

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dilihat dari segi realisasi anggaran sangat fluktuatif terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 7,56 persen, tahun 2017 turun menjadi sebesar 4,08 persen, tahun 2018 naik menjadi sebesar 24,50 persen dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar - 2,36 persen dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 40,32 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,32 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 14,82 persen.

Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :

Tabel5. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	Pertumbuhan (%)
1.	2016	247.954.400	15,24
2.	2017	325.952.740	31,57
3.	2018	367.529.110	12,92
4.	2019	591.247.751	61,03
5.	2020	604.776.300	2,19
J u m l a h		2.137.460.301	122,95
Rata-rata		427.492.060	24,59

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 15,24 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 31,57 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 12,92 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 61,03 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 2,19 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 61,03 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 2,19 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 24,59 persen. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 6. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	Dana Alokasi Umum	Pertumbuhan (%)
1.	2016	998.863.370	12,25
2.	2017	1.153.777.780	15,53
3.	2018	1.158.374.600	0,43
4.	2019	1.475.540.106	27,37
5.	2020	1.583.746.053	7,32
J u m l a h		6.370.301.909	62,90
Rata-rata		1.274.060.381	12,58

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 12,25 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 15,53 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 0,43 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 27,37 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi 7,32 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 27,37 persen. sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 0,43 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 12,58 persen. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016-2020 akan disajikan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	Dana Alokasi Khusus	Pertumbuhan (%)
1.	2016	112.985.700	10,29
2.	2017	143.742.300	27,67
3.	2018	145.426.210	1,39
4.	2019	355.202.497	14,48

5.	2020	434.261.210	22,25
J u m l a h		1.191.617.917	53,83
Rata-rata		238.323.583	10,76

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,29 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 27,67 persen, tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 1,39 persen dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 14,48 persen dan tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 22,25 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 27,67 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1,39 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 10,76 persen. Selanjutnya untuk melihat secara mendetail bagaimana peranan dana perimbangan dalam melengkapi kecukupan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik selama 5 tahun akan disajikan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 8. Perkembangan Dana Perimbangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	Dana Alokasi khusus Non Fisik	Pertumbuhan (%)
1.	2016	1.124.781,030	13,35
2.	2017	1.501.552,210	33,54
3.	2018	1.624.147,050	8,19
4.	2019	1.139.543.578	-29,86
5.	2020	1.246.582.909	9,39
J u m l a h		6.636.606.777	34,61
Rata-rata		1.327.321.355	6,92

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka pertumbuhan dana perimbangan yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus Non Fisik dilihat dari segi realisasi anggaran terhitung sejak tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 13,35 persen, tahun 2017 naik menjadi sebesar 33,54 persen, tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar 8,19 persen dan tahun 2019 menurun drastis lagi menjadi sebesar -29,86 persen dan tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 9,39 persen. Angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 33,54 persen, sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar -29,86 persen. Angka pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020 mencapai 6,92 persen.

Kontribusi Dana Perimbangan Berdasarkan Sumbernya Terhadap PDRB

Untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan bidang terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) baik ditinjau dari segi harga berlaku maupun ditinjau dari segi harga konstan Tahun 2010. Mengenai bagaimana gambaran kontribusi masing-masing sumber dana perimbangan terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), secara lebih spesifik akan disajikan melalui tabel di bawah.

Tabel 9. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Dana Bagi Hasil Pajak	Kontribusi (%)
1	2016	116.464.760	98.450,50	0,08
2	2017	123.822.760	102.333,60	0,08
3	2018	123.868.015	127.756,40	0,10
4	2019	132.422.366	124.847,16	0,09
5	2020	133.521.764	174.135,49	0,13
Jumlah		630.099.665	627.523,16	0,48
Rata-rata		126.019.933	125.504,63	0,10

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,08 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,08 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,10 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,09 persen dan tahun 2020 sebesar 0,13 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,13 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,08 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,10 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) akan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Dana Bagi Hasil Pajak	Kontribusi (%)
1	2016	94.524.290	98.450,50	0,10
2	2017	94.608.210	102.333,60	0,11
3	2018	90.391.460	127.756,40	0,14
4	2019	94.014.740	124.847,16	0,13
5	2020	93.269.133	174.135,49	0,19
Jumlah		466.807.833	627.523,16	0,67
Rata-rata		93.361.566	125.504,63	0,13

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat

ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,10 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,11 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,13 persen dan tahun 2020 sebesar 0,19 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,19 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,10 persen. Secara rata-rata kontribusi dana bagi hasil pajak (DBHP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,13 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan sumber penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) akan dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 11. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	Kontribusi (%)
1	2016	116.464.760	247.954,40	0,21
2	2017	123.822.760	325.952,74	0,26
3	2018	123.868.015	367.529,11	0,29
4	2019	132.422.366	591.247,75	0,45
5	2020	133.521.764	604.776,30	0,43
J u m l a h		630.099.665	2.137.460,30	1,64
Rata-rata		126.019.933	427.492,06	0,33

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA (DBHBP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,21 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,26 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,29 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,45 persen dan tahun 2020 sebesar 0,43 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,45 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,21 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,33 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK).

Tabel 12. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	Kontribusi (%)
1	2016	94.524.290	247.954,40	0,26
2	2017	94.608.210	325.952,74	0,34
3	2018	90.391.460	367.529,11	0,41
4	2019	94.014.740	591.247,75	0,63
5	2020	93.269.133	604.776,30	0,65
J u m l a h		466.807.833	2.137.460,30	2,29
Rata-rata		93.361.566	427.492,06	0,46

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana

perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA (DBHBP) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,26 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,34 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,41 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,63 persen dan tahun 2020 sebesar 0,65 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,65 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,26 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,46 persen.

Untuk melihat secara lebih terinci seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 13. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Dana Alokasi Umum	Kontribusi (%)
1	2016	116.464.760	998.863,37	0,86
2	2017	123.822.760	1.153.777,78	0,93
3	2018	123.868.015	1.158.374,60	0,94
4	2019	132.422.366	1.475.540,11	1,11
5	2020	133.521.764	1.583.746,05	1,19
J u m l a h		630.099.665	6.370.301,91	5,03
Rata-rata		126.019.933	1.274.060,38	1,01

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari **Dana Alokasi Umum (DAU)** terhadap laju

pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,86 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,93 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,94 persen, pada tahun 2019 naik menjadi 1,11 persen dan tahun 2020 naik menjadi 1,19 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,19 persen dan kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 0,86 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,01 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 14. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Dana Alokasi Umum	Kontribusi (%)
1	2016	94.524.290	998.863,37	1,06
2	2017	94.608.210	1.153.777,78	1,22
3	2018	90.391.460	1.158.374,60	1,28
4	2019	94.014.740	1.475.540,11	1,57
5	2020	93.269.133	1.583.746,05	1,70
J u m l a h		466.807.833	6.370.301,91	6,83
Rata-rata		93.361.566	1.274.060,38	1,37

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap laju

pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 1,06 persen, tahun 2017 masih sebesar 1,22 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,28 persen, pada tahun 2019 sebesar 1,57 persen dan tahun 2020 sebesar 1,70 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,70 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,06 persen. Adapun kontribusi rata-rata Dana Alokasi Umum terhadap laju pertumbuhan PDRB selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,37 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun dihitung sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 15. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Dana Alokasi Khusus	Kontribusi (%)
1.	2016	116.464.760	112.985,70	0,09
2.	2017	123.822.760	143.742,30	0,11
3.	2018	123.868.015	145.426,21	0,12
4.	2019	132.422.366	355.202,49	0,26
5.	2020	133.521.764	434.261,21	0,32
J u m l a h		630.099.665	1.191.617,91	0,90
Rata-rata		126.019.933	238.323,58	0,18

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju

pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,09 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,11 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,12 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,26 persen dan tahun 2020 sebesar 0,32 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,32 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,09 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 1,18 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 16. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Dana Alokasi Khusus	Kontribusi (%)
1.	2016	94.524.290	112.985,70	0,12
2.	2017	94.608.210	143.742,30	0,15
3.	2018	90.391.460	145.426,21	0,16
4.	2019	94.014.740	355.202,49	0,38
5.	2020	93.269.133	434.261,21	0,47
J u m l a h		466.807.833	1.191.617,91	1,28
Rata-rata		93.361.566	238.323,58	0,26

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama

kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,12 persen, tahun 2017 masih sebesar 0,15 persen, pada tahun 2018 sebesar 0,16 persen, pada tahun 2019 sebesar 0,38 persen dan tahun 2020 sebesar 0,47 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,47 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,12 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,26 persen. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB), ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 17. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kontribusi (%)
1.	2016	116.464.760	1.124.781,03	0,96
2.	2017	123.822.760	1.501.552,21	1,21
3.	2018	123.868.015	1.624.147,05	1,31
4.	2019	132.422.366	1.139.543,57	0,86
5.	2020	133.521.764	1.246.582,90	0,94
J u m l a h		630.099.665	6.636.606,77	4,35
Rata-rata		126.019.933	1.327.321,35	0,86

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan

kecenderungan tumbuh berfluktuatif juga. Sebagai ilustrasi pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,96 persen, tahun 2017 masih sebesar 1,21 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen, pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,86 persen dan tahun 2020 naik menjadi sebesar 0,94persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,86 persen. Adapun rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 0,86 persen. Untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Perimbangan berdasarkan bidang terhadap Product Domestic Regional Brutto (PDRB), yang bersumber dari Dana Alokasi khusus Non Fisik ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 18. Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 (Ribuan rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kontribusi (%)
1	2016	94.524.290	1.124.781,03	2,76
2	2017	94.608.210	1.501.552,21	3,62
3	2018	90.391.460	1.624.147,05	1,80
4	2019	94.014.740	1.139.543,57	1,21
5	2020	93.269.133	1.246.582,90	1,34
J u m l a h		466.807.833	6.636.606,77	10,73
Rata-rata		93.361.566	1.327.321,35	2,15

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus Non Fisik terhadap laju pertumbuhan ekonomi atau Product Domestic Regional Brutto (PDRB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016- 2020, jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menunjukkan kecenderungan tumbuh relatif kecil juga. Sebagai ilustrasi pada

tahun 2016 kontribusinya hanya 2,76 persen, tahun 2017 masih sebesar 3,62 persen, pada tahun 2018 sebesar 1,80 persen, pada tahun 2019 sebesar 1,21 persen dan tahun 2020 sebesar 1,34 persen. Kontribusi tertinggi hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,62 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,21 persen. Adapun kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 2,15 persen.

DAFTAR PUSTAKA

-, 2005. “Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Ditjen BAKD Depdagri, Jakarta.
-, 2006. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
-, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
- Bastian, Indra., 2001. “Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001”. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul., 2002. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
-, 2004. “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hariyadi, Jasagung, 1999, “Evaluasi Sisa Perhitungan Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 1991/1992 – 2000”, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Hasbullah Yusuf, 2007, Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002-2005). Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.2 April 2007.
-, 2007, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007.
- Kama, 2002. “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perencanaan APBD Tahun 2001 Bidang Pembangunan SDM di Lombok Tengah”. Tesis S2, Program Pascasarja Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (tidak dipublikasikan).
- Kuncoro, Mudrajad., 2003. “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana meneliti & menulis tesis)”. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Luo, Huaping and Robert T Golembiewski., 1996. “Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts”. The Pennsylvania State University, JXR11 @ PSU.EDU.
- Mamesah D.J., 1995. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, MBA, Ak., 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
-, 2001. “Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa”. *Makalah*, Jakarta.

-, 2002. *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
-, 2004. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Muin Abdul, 2003. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 1998/1999-2001. Tesis S-2 Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (tidak dipublikasikan)
- Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004. *“Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Nazir Moh, Ph.D, 1983. Metode Penelitian, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparmoko.M, MA, Ph.D, 2003. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi 5, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Sugiyono., 1999. *“Metode Penelitian Bisnis”*. Penerbit CV. ALFABETA, Bandung.
- Wesen Eugene F. Brigham J. Fred., 2001. *“Dasar-dasar Manajemen Keuangan”*. Edisi Kesembilan Jilid I.
- Widodo, Hg, S.T., 1990. *“Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia”*. Kanisius, Yogyakarta.
- William, N Dunn., 1998. *“Analisis Kebijakan Publik”*. Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.